BAB IV

POKOK PEMBAHASAN

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

4.1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Bagian Anggaran merupakan Bagian penyusunan anggaran kegiatan dalam penyusunan APBD. Pada Bagian ini dapat melakukan penyusunan rencana anggaran persatuan kerja dari awal hingga sampai terjadi perubahan. Juga melakukan penyusunan dokumen anggaran per satuan kerja dari awal hingga perubahannya.

Adapun modul-modul rinciannya adalah sebagai berikut :

1. **Modul RASK** terdiri dari :
   a. Formulir S1 :Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tugas Pokok, dan Fungsi Satuan Kerja
   b. Formulir S2 dan S2A :Berisi Program dan Kegiatan Satker
   c. Formulir S3A1 :Anggaran Pendapatan per Kegiatan
   d. Formulir S3B1.1 :Anggaran Belanja Langsung per Kegiatan
   e. Formulir S3B2.1 :Anggaran Belanja Tak Langsung
   f. Formulir S3B2.2 :Anggaran Belanja Gaji & Tunjangan Beras
   g. Formulir S3B3 :Anggaran Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan
   h. Formulir S3B4 :Anggaran Belanja Tak Tersangka

2. **Modul DASK** terdiri dari :

   a. DASK Pendapatan

   b. DASK Belanja Administrasi Umum

   c. DASK Belanja Operasi dan Pemeliharaan

   d. DASK Belanja Modal

   e. DASK Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

   f. DASK Gaji

   g. DASK Tunjagan Beras

3. **Modul Dokumen APBD** berguna untuk :

   a. Penyusunan Dokumen Cetak Peraturan Daerah (Perda) APBD;

   b. Dokumen Cetak Pengesahan Penjabaran dan Perubahan APBD

   c. Dokumen Cetak Hasil perhitungan Ringkasan dan Rekapitulasi APBD

4. **Modul Kas Triwulan** berguna untuk

   1. Penyusunan Anggaran Kas Triwulan (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan)

   2. Bagian Akuntansi (Realisasi APBD)

5. **Modul SKO** untuk pengesahan Otorisasi Kredit Anggaran, pembuatan dokumen cetak SKO, register SKO.

6. Modul Buku Besar

Untuk menangani :

a. Buku Besar Penerimaan : dari entri data transaksi dan dokumen jurnalnya;

b. Buku Besar Pengeluaran : dari entri data transaksi dan dokumen jurnalnya;

c. Buku Besar Pembantu : untuk menangani transaksi selain kas.

d. Jurnal Umum : merupakan dokumen-dokumen jurnal hasil pengolahan data transaksi posting dari modul lainnya.

7. Modul Belanja

Untuk menangani :

Proses belanja Beban Tetap dan Laporan belanja melalui pengisian kas, pengajuan pembayaran belanja BT dalam bentuk rincian SPP-BT, pengesahan SPP-BT, jurnal belanja keseluruhan (Adum, OP, BM, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan).

8. Modul Pendapatan

Untuk menangani :

a. Daftar Sumber Pendapatan

b. Penetapan Pendapatan : SKPD dan SKRD

c. Penerimaan Pendapatan, dan

d. Daftar dan TampilanJurnal Pendapatan : dalam bentuk *double entri*

9. Modul Pembiayaan

Untuk menangani :

a. Daftar Rekanan Pembiayaan

b. Penerimaan Pembiayaan Daerah

c. Pengeluaran Pembiayaan Daerah,

d. Daftar dan Dokumen Jurnal Pembiayaan

10. Modul Kas

Untuk menangani :

a. Buku Kas Pemegang Kas

b. Pengajuan Rincian SPP-PK,

c. Pengesahan SPP-PK,

d. Pembuatan SPMU-BT/PK,

e. Realisasi SPMU-BT/PK

f. Transfer dana, setoran dan penarikan Kas Satker dan Kas Daerah, Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban,

g. Register SPJ, serta

h. Daftar dan Dokumen Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran Kas.

11. Modul Laporan

Untuk menangani :

Laporan Aliran Kas per-Satker, Laporan Neraca per-Satker maupun rekapitulasi keseluruhan.

12. Modul Ikhtisar Eksekutif

Untuk menangani :

1. Penyusunan Neraca Daerah,
2. Penyusunan Laporan Aliran Kas Daerah
3. Penyusunan Nota Perhitungan APBD.

13. Modul Jurnal

Untuk menangani (pencarian transaksi) : merupakan cara langsung untuk mencari jurnal transaksi double entri dari buku besar, kas, spj, belanja, pendapatan dan pembiayaan maupun sub-modul lainnya.

4.2. Pendekatan Dan Metodologi Yang Dilakukan Perusahaan Jasa

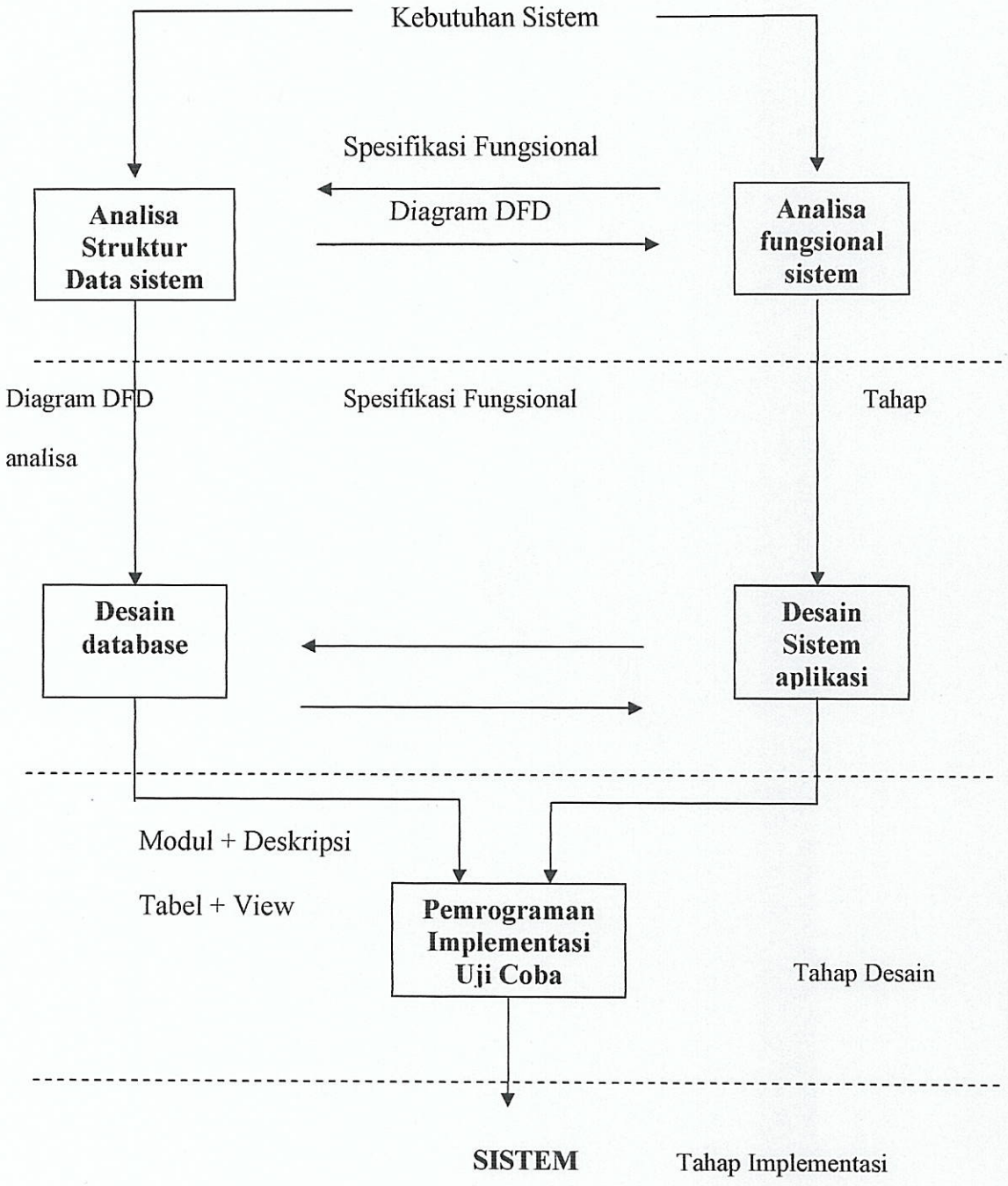
4.2.1. Tahapan pekerjaan

a. Memeriksa tehadap prosedur-prosedur, formulir-formulir dan laporan-laporan yang berhubungan dengan sistem akuntansi Pemerintah daerah.

b. Menganalisis operasi, perencanaan dan pengendalian sistem akuntansi keuangan daerah

c. Mendesain sistem informasi yang dapat mendukung semua operasi, perencanaan dan pengendalian sistem anggaran dan akuntansi Pemerintah Daerah

d. Membuat penyesuaian program aplikasi untuk Sistem Akuntansi Pemerintah.



Gambar 4.2.1. Diagram tahapan yang dilakukan perusahaan jasa

e. Pendekatan dan Metodologi

1. *Pendekatan Sistem*

   Merupakan pendekatan yang memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan yang utuh yang terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan lain dalam organisasi.

2. *Top Down Approach*

   Dimulai dari level atas organisasi/*strategic planning*, mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan organisasi. Menganalisa kebutuhan informasi input, proses, output, basis data, prosedur-prosedur operasi dan kontrol.

3. *Pendekatan Modular*

   Yaitu memecah sistem yang rumit menjadi bagian-bagian modul yang lebih sederhana, untuk mempermudah perencanaan tahap-tahap pekerjaan agar tepat waktu, mudah dipahami dan mudah dipelihara.

4. *Pendekatan berkembang*

   Aplikasi harus dapat terbuka untuk dapat dikembangkan dikemudian hari.

5. *Pendekatan Tersusun*

Pekerjaan dilakukan dengan susunan tahap-tahap pekerjaan yang baik sehingga tidak membingungkan dari mulai analisis, desain kemudian implementasi.

6. *Pendekatan Objek Oriented*

Saat ini perangkat lunak untuk membangun aplikasi sudah begitu canggih dimana bisa lebih mempercepat proses pemrograman dengan semakin meningkatnya kompleksitas yaitu dengan pemrograman berorientasi Objek, menghasilkan aplikasi *user friendly* dan performance tinggi, proses alur kerja yang mudah, system menjadi lebih modular yang encapsulated dan tingkat abstraksi yang tinggi sehingga ketergantungan antar modul menjadi rendah, sehingga memudahkan perawatan dan pengembangan.

7. *Metode Penerapan Paralel*

Antara sistem lama dan sistem baru dijalankan bersamaan sampai semua sistem lama dapat digantikan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

4.2.2. PEMENUHAN SPESIFIKASI TEKNIS

4.2.2.1. Kebutuhan Fungsional

a. Lingkungan perangkat lunak SAKD berbasis *windows (Windows Based).*

b. Lingkungan pengoperasian SAKD berbasis pada sistem menu terstruktur yang mudah dipahami dan digunakan.

c. SAKD memiliki dan menyediakan fungsi keamanan sistem dan otoritas akses.

d. SAKD memiliki dan menyediakan fungsi pengolahan data.

e. SAKD memiliki dan menyediakan fungsi pembuatan laporan

4.2.2.2. Lingkungan Perangkat Keras

a. SAKD dapat digunakan dan dioperasikan pada Komputer berbasis PC *(Personal Komputer)*

b. Persyaratan dan spesifikasi teknis perangkat komputer.

1. Server : Dual Processor (Processor setara Pentium IV), RAM 512 MB, HD 50 GB
2. Client : Pentium III, RAM 128 MB (Kebutuhan Minimum)
3. Networking : Network Card, Hub, Kabel UTP

c. SAKD dapat dioperasikan dalam jaringan berbasis Client Server atau internet/Intranet.

d. Aplikasi SAKD disimpan di dalam Server dan dapat diakses dan digunakan oleh pengguna Melalui *Workstation / Server*

4.2.2.3. Lingkungan Perangkat Lunak

a. SAKD berbasis Windows *(Windows Based Application)* atau WEB (*Web based Application*), berdasarkan arsitektur *Three Tier (Three Tier Architecture).*

b. SAKD dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam situs Web Pemkab, dimasa yang akan datang.

c. Sistem aplikasi yang akan dikembangkan terlepas/tidak bergantung pada versi Sistem Operasi *(Operating System)* yang digunakan pada terminal kerja.

d. Daftar seluruh perangkat lunak yang akan digunakan pada saat pembangunan SAKD. Versi standard *(Window server OS),*

1)	*SERVER OS*	*: Windows 2000/2003 Server*
2)	*WEB SERVER*	*: IIS 5/6*
3)	*SERVER SCRIPT*	*: ASP, VB Script & Java Script*
4)	*Brower Script*	*: HTML, XML VB Script & Java*
5)	*Script*	
6)	*BROWSER*	*: Internet Explorer 6*
7)	*DATA BASE*	*: MySQL / Oracle / SAP*

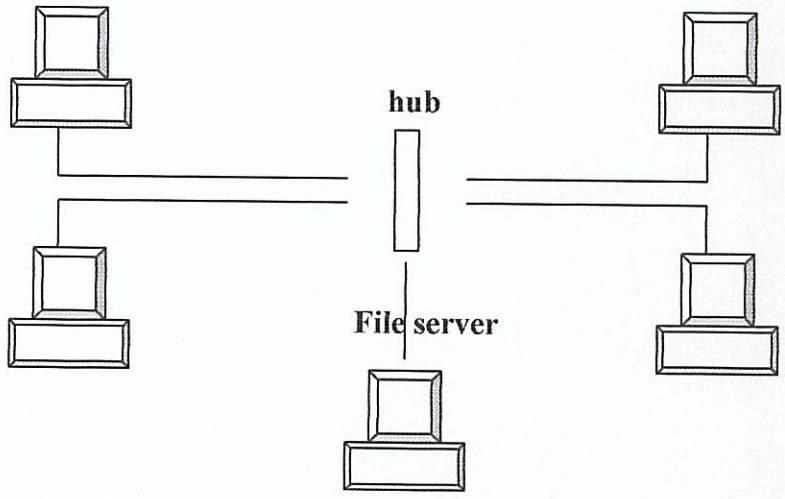
e. Pengembang mencantumkan identifikasi Versi SAKD, yang disusun berurutan berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi selama masa perkembangan aplikasi.

f. Aplikasi dapat dengan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan di kemudian hari.

4.2.2.4 Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang digunakan di Pemerintah Daerah Purwakarta adalah *topologi star* (topologi bintang). Topologi ini menyambungkan setiap *node* (Komputer dan peralatan lain) ke hub atau switch. Data yang dikirimkan dalam topologi bintang akan melalui *hub* atau *switch* sebelum ketujuannya. Hub akan menyalurkan data yang dikirim ke seluruh komputer yang terhubung ke *hub*. Kabel yang digunakan adalah kabel *Unshielded Twisted Pair* (UTP).

Topologi Star



Gambar 4.2.2.4. Topologi Jaringan Yang Digunakan Di Pemerintah Daerah Purwakarta

Kebaikan topologi ini adalah:

1. mudah untuk menyambungkan kabel jaringan
2. mudah mendeteksi masalah pada jaringan
3. tidak dapat mengganggu jaringan apabila menambah atau mengurangi peralatan dalam jaringan

Kelemahan topologi ini adalah:

1. memerlukan kabel yang panjang (setiap node satu kabel)
2. sekiranya hub gagal berfungsi maka seluruh jaringan tidak dapat beroperasi
3. biaya pemasangan yang lebih dibandingkan topologi bus

4.2.2.5. Lingkungan Operasi Aplikasi

a. SAKD dapat dioperasikan melalui sistem Menu yang disusun secara terstruktur.
b. Sistem Menu dapat dengan mudah dipahami dan digunakan *(User Friendly).*

d. SAKD memiliki fungsi untuk mengubah *Password* , yang dapat ilakukan oleh masing-masing pengguna.

e. Password disimpan dengan menggunakan metoda/mekanisme

4.2.2.7. Fungsi Pengelolaan Data

a. SAKD memiliki dn menyediakan fungsi untuk memasukkan dan merekam data baru.

b. SAKD memiliki dan menyediakan fungsi perubahan data, yang minimal tetapi tidak terbatas pada modifikasi, penghapusan, pembatalan.

c. Setiap data yang dimasukkan atau direkam atau diubah dapat dijamin kebenarannya Melalui proses Verifikasi dan Validasi yang ketat.

d. SAKD memiliki fungsi pencarian data berdasarkan suatu kriteria tertentu.

e. SAKD memiliki dan menyediakan fungsi navigasi.

f. SAKD memiliki dan menyediakan fungsi konversi, untuk mengeluarkan hasil fungsi pengolahan data ke dalam format file *Microsoft Word* dan *Excel,* dengan pemilihan kolom tertentu.

d. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki dan menyediakan fungsi keamanan sedemikian rupa sehungga Basis Data tidak dapat dibuka atau dilihat begitu saja.

e. Sistem Pengelola Basis Data yang digunakan mampu menyimpan dan menangani Basis Data pada ukuran yang sangat besar.

f. Fungsi-fungsi pengelolaan Basis Data dapat berjalan secara otomatis dan periodic, tanpa intervensi/campur tangan administrator.

4.3. Kegiatan Kerja Praktek

Selama kerja praktek dipemda Purwakartakami ditempatkan di sub bagian verifikasi dan sub bagian pembukuan. Di sub bagian verifikasi kami ditugaskan mengentri surat pertanggungjawaban (SPJ) dari bulan februari sampai bulan juni. Begitu pula pada sub bagian pembukuan kami ditugaskan mencatat bukti transaksi dari bulan februari sampai bulan juni. Selain itu juga kami mengikuti berbagai kegiatan yang ada .


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM